

ANALISIS KETERTINGGALAN DESA DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH : STUDI KUALITATIF TERHADAP 14 DESA TERTINGAL

Muhammad Ihza Mahendra¹, Sri Dwi Fajaririn², Lesti Heriyanti³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Email: yahodan008@gmail.com¹, lestiheriyanti@umb.ac.id³

Abstract: *This study aims to analyze the factors contributing to underdevelopment in 14 villages in Central Bengkulu Regency. Rural underdevelopment is a multidimensional issue encompassing social, economic, infrastructure, education, and access to basic services (Bappenas, 2020). Using a qualitative approach, this study collected data through field observations, in-depth interviews with village officials and the community, and documentation from various local government sources. The results indicate that rural underdevelopment in this region is influenced by a combination of limited transportation access, minimal supporting infrastructure, low levels of education, and a lack of sustainable development interventions from the government (Ministry of Villages, 2022). Furthermore, geographical factors and weak community participation in development also exacerbate the underdevelopment (Rifai, 2021). This study recommends the need for a participatory and sustainable development approach, taking into account the local potential and specific needs of each village. These findings are expected to provide a basis for more targeted policymaking to accelerate the development of underdeveloped villages in Central Bengkulu.*

Keywords: *Village Underdevelopment, Central Bengkulu, Development, Qualitative Study, Underdeveloped Villages.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fakto-faktor yang menyebabkan ketertinggalan pada 14 desa di kabupaten Bengkulu Tengah. Ketertinggalan desa merupakan persoalan multidimensional yang mencakup aspek social, ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan akses terhadap layanan dasar (Bappenas,2020). Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan aparat desa dan masyarakat, serta dokumentasi dari berbagai sumber pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketertinggalan desa di wilayah ini dipengaruhi oleh kombinasi antara keterbatasan akses transportasi, minimnya infrastruktur penunjang, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya intervensi pembangunan yang berkelanjutan dari pemerintah(Kementrian desa, 2022). Selain itu, factor geografis dan lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga memperkuat kondisi ketertinggalan(Rifai, 2021). Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan pembangunan yang partisipasi dan berkelanjutan, dengan memperhatikan potensi local dan kebutuhan spesifik tiap desa. Temuan ini diharapkan menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam upaya percepatan pembangunan dea tertinggal di Bengkulu Tengah.

Kata Kunci: Ketertinggalan Desa, Bengkulu Tengah, Pembangunan, Studi Kualitatif, Desa Tertinggal.

PENDAHULUAN

Pembangunan yang merata merupakan tujuan utama dari kebijakan nasional untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Namun, pada praktiknya, ketimpangan antarwilayah masih menjadi persoalan krusial, terutama di tingkat desa. Di Provinsi Bengkulu, khususnya Kabupaten Bengkulu Tengah, permasalahan desa tertinggal masih menjadi isu pembangunan yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Berdasarkan data terakhir yang dihimpun dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, terdapat 14 desa di Kabupaten Bengkulu Tengah yang dikategorikan sebagai desa tertinggal.

Desa tertinggal umumnya ditandai dengan berbagai keterbatasan dalam akses terhadap layanan dasar, minimnya kegiatan sosial dan ekonomi, lemahnya infrastruktur, serta terbatasnya kemampuan administrasi pemerintahan desa. Ketertinggalan ini bukan hanya persoalan geografis, tetapi juga akibat dari kurangnya perhatian struktural dan minimnya intervensi kebijakan yang bersifat afirmatif. Hal ini berdampak langsung terhadap rendahnya kualitas hidup masyarakat desa serta menghambat pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Di Kabupaten Bengkulu Tengah, permasalahan desa tertinggal sangat beragam. Mulai dari tidak tersedianya fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai, keterbatasan jaringan transportasi dan komunikasi, hingga persoalan ekonomi rumah tangga yang masih menggantungkan diri pada sektor pertanian tradisional dengan produktivitas rendah. Wilayah-wilayah seperti Kecamatan Pondok Kelapa, Kecamatan Bang Haji, dan Kecamatan Merigi Sakti masih memiliki desa-desa yang

terpencil, sulit diakses, dan jauh dari pusat pelayanan publik. Beberapa desa bahkan belum memiliki jaringan listrik yang stabil atau infrastruktur jalan yang layak.

Fenomena ini menciptakan lingkaran setan ketertinggalan: keterbatasan infrastruktur menyebabkan rendahnya aktivitas ekonomi, lemahnya aktivitas ekonomi membuat masyarakat sulit keluar dari kemiskinan, dan kemiskinan memperkuat ketergantungan pada bantuan tanpa mampu menghasilkan inovasi lokal. Tanpa intervensi serius, desa-desa tertinggal ini berisiko mengalami stagnasi pembangunan dalam jangka panjang.

Di sisi lain, penting untuk memahami bahwa masyarakat desa bukanlah objek pasif pembangunan. Banyak desa yang memiliki modal sosial kuat berupa solidaritas, gotong royong, serta kearifan lokal yang dapat dijadikan dasar dalam mendorong pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, analisis yang lebih dalam terhadap kondisi 14 desa tertinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah dibutuhkan sebagai landasan dalam merumuskan strategi pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini hadir sebagai upaya untuk menggambarkan secara mendalam realitas desa tertinggal di Bengkulu Tengah. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengeksplorasi kondisi infrastruktur, sosial, ekonomi, serta kelembagaan desa. Dengan memahami akar masalah dan potensi lokal yang ada, diharapkan dapat dirumuskan strategi pembangunan yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam rangka mempercepat proses keluar dari ketertinggalan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi aktual 14 desa tertinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah dilihat dari aspek layanan dasar, ekonomi, dan administrasi desa?
2. Apa saja faktor utama yang menyebabkan desa-desa tersebut mengalami ketertinggalan?
3. Bagaimana peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal dalam mengatasi ketertinggalan desa?
4. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk mempercepat pembangunan desa-desa tertinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah?

Tujuan Penelitian

- 1) Mendeskripsikan kondisi aktual 14 desa tertinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah.
- 2) Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketertinggalan desa dari berbagai aspek sosial, ekonomi, dan struktural.
- 3) Menganalisis peran dan kebijakan pemerintah dalam menangani desa tertinggal di Bengkulu Tengah.
- 4) Merumuskan strategi pembangunan desa yang kontekstual dan relevan untuk mempercepat peningkatan status desa tertinggal.

Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam kajian sosiologi pembangunan dan kebijakan desa. Dengan fokus pada kasus konkret di Kabupaten Bengkulu Tengah, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang penanganan desa tertinggal dalam konteks wilayah Indonesia

bagian barat yang relatif masih terpinggirkan dalam wacana pembangunan nasional.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi: Pemerintah daerah, sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembangunan desa tertinggal berbasis data dan realitas lapangan. Perangkat desa, sebagai dasar untuk melakukan refleksi dan perbaikan internal dalam tata kelola pemerintahan desa. LSM dan mitra pembangunan, sebagai acuan dalam merancang program pemberdayaan masyarakat desa yang lebih tepat sasaran. Masyarakat desa, sebagai sarana untuk memahami kondisi desanya serta mendorong keterlibatan aktif dalam proses pembangunan.

TINJAUAN PUSTAKA

1) Konsep Desa Tertinggal

Desa tertinggal secara konseptual merujuk pada wilayah pedesaan yang memiliki tingkat perkembangan jauh di bawah standar nasional dalam hal infrastruktur dasar, kualitas sumber daya manusia, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), suatu desa dikategorikan sebagai tertinggal apabila memiliki skor Indeks Desa Membangun (IDM) yang rendah, mencerminkan rendahnya dimensi pelayanan dasar, kondisi sosial ekonomi, serta kelembagaan desa.

Ciri khas desa tertinggal umumnya mencakup:

- Rendahnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
- Ketiadaan atau kerusakan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih.
- Keterbatasan dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal.

- Lemahnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa.

Pendekatan penanganan desa tertinggal tidak bisa bersifat seragam karena setiap desa memiliki karakteristik sosial, geografis, dan budaya yang unik. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang berhasil di satu desa belum tentu dapat diterapkan di desa lainnya tanpa adaptasi kontekstual.

2) Teori Ketimpangan Akses dan Pembangunan Wilayah

Secara teoritis, pendekatan pembangunan wilayah banyak diwarnai oleh konsep ketimpangan struktural yang dijelaskan oleh tokoh seperti Gunnar Myrdal dan Albert O. Hirschman. Myrdal mengembangkan teori circular causation, di mana ketertinggalan suatu wilayah akan semakin parah jika tidak ada intervensi karena efek penguatan dari faktor-faktor negatif. Sementara Hirschman menyoroti pentingnya linkage effect, yaitu keterkaitan antar sektor dalam pembangunan yang bila tidak optimal akan memperbesar disparitas antarwilayah.

Dalam konteks desa tertinggal, teori ini menjelaskan bagaimana keterbatasan dalam satu sektor, seperti infrastruktur, dapat mempengaruhi aspek lain seperti ekonomi dan pendidikan. Ketika tidak ada koneksi jalan, hasil pertanian sulit dipasarkan, pendapatan menurun, dan keluarga tidak bisa menyekolahkan anak hingga jenjang tinggi. Rantai ini terus berulang dan memperdalam ketertinggalan.

3) Studi Terkait

Beberapa studi sebelumnya memberikan pemahaman tentang kondisi desa tertinggal dan strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya.

1. Rohman (2020) dalam penelitiannya di Sumatera Barat menemukan bahwa desa tertinggal mengalami kesenjangan pembangunan karena orientasi anggaran yang tidak memprioritaskan wilayah terpencil. Ia menyarankan adanya afirmasi khusus dari APBD.
2. Suhendar & Hafid (2022) menyatakan bahwa keberhasilan program pemberdayaan di desa tertinggal sangat dipengaruhi oleh keberadaan pendamping desa yang kompeten serta partisipasi aktif masyarakat.
3. Ramadani et al. (2023) melakukan studi di desa tertinggal di Sulawesi dan menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik desa memberikan dampak positif terhadap efisiensi birokrasi dan partisipasi warga dalam pembangunan.
4. Di Provinsi Bengkulu, studi oleh Rahayu (2023) menyoroti bahwa ketertinggalan desa banyak berkaitan dengan posisi geografis, minimnya alokasi dana pembangunan infrastruktur, serta lemahnya inovasi dari aparat desa dalam pengelolaan potensi lokal.

Dengan merujuk pada studi-studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi penanganan desa tertinggal haruslah bersifat holistik, kontekstual, dan partisipatif. Tidak cukup hanya mengandalkan dana, tetapi juga perlu ada

penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas masyarakat, dan dukungan lintas sektor

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Wilayah ini dipilih karena memiliki 14 desa yang diklasifikasikan sebagai desa tertinggal berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun terakhir. Desa-desa tersebut tersebar di beberapa kecamatan, antara lain Kecamatan Pondok Kelapa, Bang Haji, Pematang Tiga, Merigi Sakti, dan Pondok Kubang.

Letak geografis yang sebagian besar berada di daerah perbukitan dan hutan lindung membuat akses terhadap layanan publik di desa-desa ini menjadi sangat terbatas. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji ketertinggalan dalam pembangunan desa, baik dari segi infrastruktur, sosial, maupun ekonomi.

Waktu penelitian dilaksanakan selama dua minggu, dimulai pada 15 Juni hingga 22 Juni 2025, yang mencakup tahap pengumpulan data lapangan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, serta dokumentasi kebijakan dan data statistik yang tersedia di tingkat kabupaten dan desa.

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara utuh dan mendalam kondisi desa tertinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami realitas sosial, pengalaman masyarakat, serta dinamika kebijakan yang berpengaruh terhadap kondisi ketertinggalan desa.

Jenis penelitian ini bersifat studi lapangan (field research) dengan metode eksploratif, untuk menggali informasi secara langsung dari sumber pertama, seperti warga desa, kepala desa, tokoh masyarakat, perangkat daerah, dan pendamping desa. Fokus penelitian tidak hanya pada apa yang terjadi, tetapi juga mengapa dan bagaimana ketertinggalan itu terjadi dan bagaimana strategi yang memungkinkan untuk keluar dari kondisi tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan mendalam, penelitian ini menggunakan tiga teknik utama:

- 1) Wawancara Mendalam (In-depth Interview): Dilakukan terhadap narasumber seperti kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga yang tinggal di desa tertinggal. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur agar tetap fleksibel namun terarah pada tema penelitian.
- 2) Observasi Lapangan: Peneliti mengamati langsung kondisi infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, pasar desa, serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
- 3) Studi Dokumentasi: Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti IDM, RPJMDes, laporan evaluasi pemerintah daerah, serta referensi jurnal dan buku yang relevan.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yaitu mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan

ketertinggalan desa. Langkah-langkahnya meliputi:

1. **Reduksi Data:**
Menyeleksi dan menyederhanakan data mentah untuk difokuskan pada aspek-aspek utama seperti akses layanan dasar, kegiatan ekonomi, kondisi sosial, dan kelembagaan.
2. **Penyajian Data:**
Data disusun dalam bentuk naratif, tabel ringkas, dan kutipan langsung dari informan untuk mendukung validitas.
3. **Penarikan Kesimpulan:**
Setelah data dikategorikan dan dianalisis, peneliti menyusun simpulan mengenai faktor penyebab ketertinggalan, potensi lokal, serta strategi yang dapat diterapkan untuk pembangunan desa.
Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data, dilakukan triangulasi sumber dan teknik, serta konfirmasi (member checking) kepada narasumber setelah data disusun secara sementara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Infrastruktur dan Akses Layanan Dasar

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara lapangan, 14 desa yang tergolong tertinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki kesamaan dalam hal keterbatasan akses layanan dasar. Beberapa masalah utama yang ditemukan antara lain:

1. Infrastruktur Jalan dan Transportasi

Sebagian besar desa tertinggal memiliki akses jalan yang rusak parah atau belum beraspal. Jalan desa yang sempit dan berlubang menyulitkan kendaraan roda empat masuk ke desa, terutama saat musim hujan. Hal ini menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat, seperti distribusi hasil pertanian dan perdagangan, menjadi terhambat.

2. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan di desa-desa tertinggal masih sangat terbatas. Rata-rata desa hanya memiliki SD, sementara untuk jenjang SMP atau SMA, siswa harus menempuh jarak lebih dari 5–10 km ke desa tetangga. Bahkan ada yang tidak memiliki bangunan sekolah layak, ruang kelas rusak, minim buku, dan kekurangan tenaga pendidik.

3. Layanan Kesehatan

Beberapa desa tidak memiliki fasilitas Posyandu aktif atau Puskesmas. Warga harus pergi ke puskesmas induk di ibu kota kecamatan yang berjarak belasan kilometer. Kondisi ini membuat masyarakat enggan memeriksakan diri secara rutin dan hanya mencari bantuan saat kondisi sudah parah.

4. Air Bersih dan Sanitasi

Akses terhadap air bersih masih menjadi persoalan serius. Banyak warga yang mengandalkan air sungai atau sumur gali tanpa sistem filtrasi. Di beberapa desa, belum ada sanitasi yang layak seperti MCK umum atau fasilitas limbah rumah tangga yang memadai.

5. Listrik dan Telekomunikasi

Jaringan listrik PLN tidak stabil di beberapa desa. Listrik hanya menyala pada jam tertentu atau bahkan belum masuk ke seluruh rumah. Sinyal seluler pun lemah, membuat komunikasi dan informasi dari luar sulit diakses.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa desa-desa tertinggal di Bengkulu Tengah menghadapi ketimpangan layanan dasar yang cukup akut. Ketimpangan ini berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup warga serta memperkuat siklus kemiskinan struktural di wilayah tersebut.

B. Faktor Sosial dan Ekonomi

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di desa tertinggal sangat bergantung pada sektor pertanian tradisional, seperti padi ladang, kopi, singkong, dan karet. Namun, rendahnya produktivitas dan kurangnya akses pasar membuat pendapatan masyarakat relatif rendah. Mayoritas rumah tangga hidup di bawah garis kemiskinan dan mengandalkan hasil kebun untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

1. Keterbatasan Lapangan Kerja Alternatif

Selain pertanian, nyaris tidak ada sektor ekonomi lain yang berkembang. Ketiadaan koperasi aktif, pasar desa, atau pelatihan wirausaha menyebabkan masyarakat tidak memiliki pilihan ekonomi lain. Akibatnya, angka pengangguran terbuka dan setengah menganggur cukup tinggi, terutama di kalangan pemuda.

2. Minimnya Modal dan Literasi Keuangan

Keterbatasan akses terhadap modal usaha dan lembaga keuangan mikro membuat masyarakat sulit mengembangkan usaha mandiri. Selain itu, masih rendahnya literasi keuangan menyebabkan sebagian besar warga tidak terbiasa menabung, mencatat keuangan, atau mengelola pinjaman produktif.

3. Ketergantungan terhadap Bantuan

Banyak keluarga yang menggantungkan diri pada program bantuan pemerintah seperti PKH, BLT Dana Desa, dan sembako. Walau program ini membantu dalam jangka pendek, tetapi tanpa pendampingan yang mendorong kemandirian, masyarakat tetap berada dalam siklus ketergantungan.

C. Peran Pemerintah Daerah dan Desa

Upaya pemerintah daerah dalam menangani desa tertinggal telah dilakukan melalui program pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan:

1. Koordinasi Lintas Lembaga yang Lemah
Program pembangunan desa masih berjalan sendiri-sendiri antar instansi. Tidak semua program didesain secara terintegrasi sesuai dengan kebutuhan desa, dan minimnya evaluasi menyebabkan tidak adanya keberlanjutan dari program yang sudah berjalan.
2. Kapasitas Pemerintah Desa yang Terbatas
Banyak aparatur desa yang belum memahami mekanisme perencanaan berbasis data. RPJMDes sering kali disusun tanpa partisipasi warga secara maksimal, dan tidak didukung oleh data yang valid. Akibatnya, program pembangunan yang dirancang tidak tepat sasaran.
3. Kurangnya Pendampingan dan Pengawasan
Fungsi pendamping desa belum optimal di beberapa wilayah. Beberapa desa mengaku jarang didampingi dalam menyusun perencanaan dan laporan pertanggungjawaban anggaran. Minimnya pengawasan juga berisiko menimbulkan penyalahgunaan dana desa.

D. Tantangan dan Potensi Solusi

Tantangan utama dalam percepatan pembangunan desa tertinggal di Bengkulu Tengah mencakup:

- Akses geografis yang sulit dijangkau.
- Ketimpangan alokasi anggaran pembangunan desa.

- Lemahnya kapasitas SDM desa dalam tata kelola.
- Ketergantungan terhadap dana bantuan.
- Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Namun demikian, terdapat beberapa potensi solusi, antara lain:

1. Pemetaan Ulang Prioritas Pembangunan berdasarkan data kondisi riil desa.
2. Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa, baik dalam perencanaan, pelaporan, maupun pelibatan masyarakat.
3. Optimalisasi Dana Desa untuk infrastruktur produktif dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal (misal: pertanian organik, wisata desa, koperasi).
4. Kemitraan Multipihak, melibatkan perguruan tinggi, LSM, dan sektor swasta untuk mempercepat transfer pengetahuan dan teknologi tepat guna.
5. Pendidikan Masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kolektif dan peran serta warga dalam pembangunan desa secara mandiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa 14 desa tertinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah menghadapi berbagai tantangan struktural yang kompleks, mencakup keterbatasan infrastruktur, akses layanan dasar, kondisi sosial ekonomi yang rendah, serta lemahnya kapasitas pemerintahan desa. Ketertinggalan yang terjadi bukan semata karena faktor geografis, tetapi juga akibat kurangnya intervensi kebijakan yang

menyeluruh, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan lokal.

Dari sisi infrastruktur, desa-desa tersebut masih menghadapi kerusakan jalan, ketiadaan jaringan listrik dan telekomunikasi yang memadai, serta keterbatasan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Di bidang ekonomi, masyarakat cenderung bergantung pada pertanian tradisional dengan hasil rendah, tanpa adanya diversifikasi usaha atau akses permodalan yang cukup.

Pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya melalui berbagai program, namun lemahnya koordinasi, minimnya evaluasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi penghambat utama efektivitas pembangunan. Di sisi lain, desa-desa ini memiliki potensi besar berupa semangat gotong royong, kekuatan sosial komunitas, serta potensi sumber daya lokal yang belum dimanfaatkan optimal.

Dengan strategi yang tepat dan pelibatan lintas pihak, desa-desa tertinggal di Bengkulu Tengah dapat dibangkitkan dari keterbelakangan menuju desa berkembang bahkan mandiri.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah:
 - Melakukan pemetaan kondisi dan potensi desa tertinggal secara berkala berbasis data faktual.
 - Merancang program terpadu lintas sektor dengan pendekatan spasial dan kontekstual.
 - Memberikan afirmasi anggaran dan insentif khusus bagi desa tertinggal melalui skema prioritas pembangunan kabupaten.

2. Bagi Pemerintah Desa:
 - Memperkuat perencanaan berbasis partisipasi dan data melalui pelatihan teknis bagi aparatur desa.
 - Mengalokasikan Dana Desa secara seimbang antara pembangunan fisik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi melalui pelibatan masyarakat dalam forum-forum musyawarah desa.
 3. Bagi Lembaga Mitra dan Swasta:
 - Menjalinkan kemitraan strategis dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di bidang infrastruktur, pelatihan kerja, dan pendidikan masyarakat.
 - Melibatkan perguruan tinggi dan LSM untuk membangun model pendampingan pembangunan desa berbasis riset dan teknologi tepat guna.
 4. Bagi Masyarakat:
 - Meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya partisipasi aktif dalam pembangunan desa.
 - Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama, koperasi, atau forum warga yang menjadi motor penggerak pembangunan dari akar rumput.
- Myrdal, G. (1957). *Economic Theory and Underdeveloped Regions*. London: Duckworth.
- Hirschman, A. O. (1958). *The Strategy of Economic Development*. New Haven: Yale University Press.
- Rohman, A. (2020). "Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal: Studi Kasus di Sumatera Barat." *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 10(2), 78–90.
- Suhendar, M., & Hafid, A. (2022). "Peran Pendamping Desa dalam Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Pemberdayaan Sosial*, 5(1), 41–58.
- Ramadani, H., et al. (2023). "Digitalisasi Layanan Desa dan Dampaknya pada Efektivitas Pemerintahan Lokal." *Jurnal Inovasi Desa*, 4(2), 119–133.
- Rahayu, D. (2023). "Ketimpangan Wilayah di Provinsi Bengkulu: Studi Komparatif Desa Tertinggal dan Berkembang." *Jurnal Kajian Pembangunan*, 7(1), 61–74.
- Bappenas. (2020). *Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2022). *Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2022*. Jakarta.
- Rifai, M. (2021). Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Tertinggal: Kajian Teoretis dan Empiris. *Jurnal Pembangunan Regional*, 9(2), 115–129

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2023). *Panduan Pembangunan Desa Tertinggal*. Jakarta: Direktorat Daerah Tertinggal.
- Kemendesa PDPT. (2024). *Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024*.